

MEMAHAMI PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PENGEMBANGAN (STUDI BANDING) DPR RI DAN PARIWISATA DI BANDUNG

Kholilah Sawitri¹, Anita Aprilia², Martha Zahara³, Lala Fitriani⁴, Ahmad Padli⁵,
Rissa Afni Martinouva⁶

¹⁻⁵Universitas Muhammadiyah kotabumi

⁶Universitas Malahayati

*Korespondensi : kholilah3333@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this essay is to examine the history of the House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR RI), comprehend the responsibilities and powers of the (DPR RI), describe the functions of the (DPR RI), and discuss Bandung tourism. The history of the House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR RI) began on August 29, 1945, when the President formed the Central Indonesian National Committee (KNIP) at the Pasar Baru Arts Building, Jakarta. The date was then used as the birthday of the DPR RI. In this study, the author uses an observation method with a data collection technique that is carried out through a direct observation of events or occurrences in the field accompanied by data collection such as image recordings, sound recordings, and various recordings of the state or behavior of the target object.

Keywords: History of the DPR RI; Functions of the DPR RI; Dutes and Authorities DPR RI

ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan mempelajari sejarah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan memahami Tugas dan wewenang DPR RI serta Fungsi DPR RI serta eksplorasi wisata di Bandung. Sejarah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bermula pada 29 Agustus 1945, ketika Presiden membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) di Gedung Kesenian Pasar Baru, Jakarta. Tanggal tersebut kemudian dijadikan sebagai hari lahir DPR RI. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode observasi dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan langsung terhadap peristiwa atau kejadian yang ada di lapangan disertai pengumpulan data seperti rekam gambar, rekam suara, dan berbagai pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.

Kata kunci : Sejarah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat; Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat.

PENDAHULUAN

Dalam kesempatan ini, kunjungan Ke Gedung DPR RI bertujuan untuk memperluas wawasan dan pemahaman mengenai lembaga pemerintah, sekaligus mengenal lebih dalam tentang sejarah bangsa kita. DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)

merupakan salah satu lembaga tinggi Negara yang memainkan peranan krusial dalam sistem pemerintahan Indonesia.

DPR RI adalah sebuah wujud nyata dari prinsip kedaulatan rakyat. Eksekusaaan, berpartisipasi aktif sebagai bagian dari rakyat dalam pembuatan Undang-undang dan kebijakan yang dijalankan dan dikeluarkan oleh

pemerintah. Selain itu, DPR RI juga bertugas mengawasi pelaksanaan hukum dan kebijakan tersebut, memastikan bahwa semua berjalan sesuai dengan kepentingan rakyat.(JASMINE, 2014)

Dalam Gedung DPR RI terdapat Museum DPR RI. Museum ini merupakan bagian dari sejarah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga era reformasi. Museum ini memberikan peran pendidikan serta edukasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda.(Sukirno & Haroni, 2022)



Gambar.1 Museum DPR RI

Sejak didirikannya, Museum DPR memiliki peran penting dalam mengoleksi dokumen-dokumen penting pada masa itu dan juga melestarikan benda-benda bersejarah lainnya yang pada masa itu digunakan untuk menunjang program legislasi. Sebagaimana Museum pada umumnya, tempat ini pun dapat dijadikan objek study, penelitian, dan hiburan. Namun yang paling utama dari keunggulan Museum ini dapat berfungsi sebagai alat pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai legislasi serta sampai dengan demokrasi di Indonesia.

Kunjungan ke Gedung Rapat Paripurna dan Museum DPR RI merupakan salah satu langkah besar untuk lebih mendekatkan masyarakat, yang paling utama yaitu generasi muda, dengan sistem pemerintahan Negara.

Salah satu fasilitas penting yang digunakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia adalah Gedung Rapat Paripurna DPR RI, ruangan ini berfungsi sebagai ruang rapat pengambilan keputusan penting yang pastinya akan berdampak bagi masyarakat luas. Tata letak ruang rapat ini terdiri dari Podium utama yang digunakan oleh Pimpinan sidang, area tempat duduk untuk anggota dewan, serta tempat khusus pengunjung yang dihadiri oleh masyarakat umum serta pelajar yang sedang melakukan



kunjungan edukatif.

Gambar.2 Gedung Rapat Paripurna DPR RI

Kota Bandung, atau Kota kembang merupakan kota yang terkenal dengan keindahannya yang memukau, di mana pohon-pohon dan bunga-bunga tumbuh dengan subur di wilayah ini. Selain itu Bandung juga dikenal dengan sebutan Paris van Java, karena pesonanya yang menyerupai kota Paris Prancis.

Wilayah Lembang, Bandung merupakan daerah dengan dataran tinggi yang



menyajikan banyak destinasi wisata seperti The Great Asia Afrika, Lembang Floating Market, dan D'Castello.

Gambar.3 The Great Asia Afrika

The Great Asia Afrika adalah destinasi wisata menawan yang terletak di wilayah Lembang, Bandung Barat. Konsep wisata ini memadukan keindahan alam dengan pengalaman yang menakjubkan, para pengunjung dapat dengan leluasa menikmati diri dalam beragam keindahan Miniatur-miniatur Negara Asia dan Afrika.



Gambar.4 Lembang Floating Market

Floating Market Lembang merupakan tujuan wisata yang sangat unik, sebab tempat ini menyuguhkan pengalaman Pasar Apung yang kaya dengan produk-produk local. Mulai dari



makanan hingga kerajinan tangan. Selain menikmati suasana pasar apung, pengunjung juga dapat mencoba berbagai wahana dan menikmati beragam aktivitas lainnya.

Gambar.5 D'Castello

Wisata ini terletak di dataran tinggi, tempat ini dibangun di atas lahan seluas 10 hektar yang dipenuhi berbagai jenis bunga. Salah satu daya Tarik utama pada destinasi ini adalah bangunan kastelnya yang megah juga mewah, menampilkan warna-warni cerah layaknya kastel dalam dongeng. Dengan memadu padukan arsitektur Turki dan Belanda, kastel ini menjadi pemandangan yang amat sangat menakjubkan. Bukan hanya bangunan saja ditempat ini pun tersedia banyak wahana, oleh-oleh khas bandung serta kerajinan tangan.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Observasi. Metode ini merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui objek pengamatan langsung di dalam Gedung DPR RI, Museum DPR RI serta destinasi wisata di Lembang, Bandung. Teknik observasi adalah metode yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Dalam hal ini observasi telah didominasi oleh

penggunaan Indra penglihatan, pendengaran dan cenderung di anggap inferior ini pun tercermin dalam catatan lapangan, yang sangat bergantung pada apa yang terlihat secara visual, baik oleh peneliti maupun melalui kamera sebagai alat bantu dalam pengamatan ini. (Ichsan & Ali, 2020)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kelompok 3 dpl Dr. Slamet Haryadi,S.H.,MHum.



Gambar.6 Kelompok 3 Bersama Dpl

Kelompok 3 merupakan mahasiswa fakultas hukum yang beranggotakan 5 orang Mahasiswa/i yang di bombing oleh Dosen Pembimbing Lapangan yaitu Dr. Slamet Haryadi,S.H.,MHum. Beliau adalah Dosen sekaligus Wakil Rektor II (Warek II) Universitas Muhammadiyah Kotabumi.

2. Sejarah DPR RI

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat ini memiliki sejarah panjang yang mencerminkan perjalanan perkembangan legislatif di Indonesia. Sejak era penjajahan Belanda hingga terbentuknya DPR RI, perjalanan ini banyak menyimpan berbagai peristiwa yang membentuk lembaga legislatif menjadi seperti sekarang ini.

a. Periode *volksraad* 1918-1942



Gambar.7 Volksraad 1918-1942

Pada awal abad ke-20 saat geliat pergerakan organisasi-organisasi mulai tumbuh telah menimbulkan kesadaran akan golongan terdidik. Terdapat dua keinginan dari pihak penjajah dan terjajah dimana pihak pemerintah mencoba untuk mempermudah pengawasan dari gerakan-gerakan yang mengancam kondisi bumiputera pada saat itu, sedangkan pihak pergerakan menyadari betul perlunya suatu Badan perwakilan untuk menyuarakan usulan atau pendapat dari keinginan kaum Bumiputera demi kesejahteraan rakyat.

Volksraad berfungsi sebagai tanda penengah dari pemerintah. Namun, pada tahun 1927 silam, volksraad mendapatkan

kewenangan ko-legislatif bersama dengan Gubernur jenderal yang diangkat oleh Belanda. Meski demikian, dikarenakan Gubernur Jenderal memiliki Hak Veto, maka kekuasaan volksraad tetap ada batasan. Di samping itu, jalannya keanggotaan volksraad dipilih melalui pemilihan secara tidak langsung. Pada tahun 1939 hanya 2.000 orang yang memiliki hak pilih, di mana sebagian besar warganya berasal dari Belanda dan Eropa. (Makalah_tentang_Dewan_Perwakilan_Rakyat, n.d.)

b. Periode Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)



Gambar.8 KNIP 1945-1950

Pada masa itu, belum semua Lembaga Negara yang diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 terbentuk. Oleh karena itu, posisi legislatif merujuk pada Pasal IV Peraturan Transisi UUD 1945, yang menyatakan bahwa MPR, DPR dan Dewan Pertimbangan Tertinggi di bawah Konstitusi tersebut di bentuk, segala kekuasaan diambil alih oleh Presiden. Dalam menjalankan tugasnya presiden membutuhkan bantuan dari pada Komite. Maka dari itu didirikanlah Komite Nasional

Indonesia Pusat (KNIP), komite ini dibuat sebagai Lembaga Pergantian dari masa awal hingga ke masa baru reformasi.

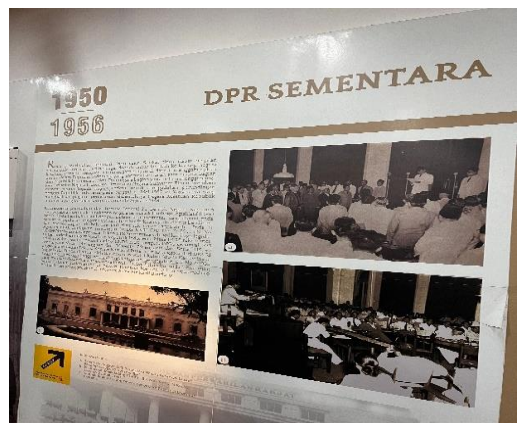
c. Periode DPR RIS 1950



Gambar.9 DPR RIS

Sehubungan dengan diterimanya Hasil Konferensi Meja Bundar), hasil bentuk susunan Negara mengalami perubahan dari Republik menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS). Hal ini sudah tercantum dalam Konstitusi RIS Pada pasal 1, yang menyatakan bahwa “kekuasaan dan kedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh Pemerintah bersamaan dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat.

d. Periode DPR Sementara 1950-1956



Gambar.10 DPR Sementara 1950-1956

Dalam ketentuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), terdapat suatu ketentuan yang dapat memberikan pendirian lebih sentral dalam melaksanakan tugasnya. Latar belakang tersebut tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 Pasal 71 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia. pasal tersebut berisikan “Dewan Perwakilan Rakyat dan juga anggota-anggotanya, serta dengan para Menteri, tidak untuk diadili di dalam persidangan atas dasar aspirasi yang mereka tuangkan di dalam Forum rapat diikuti dengan penyampaian oleh Majelis terkecuali jika ada yang mengagaskan pendapat atau memberikan informasi yang sifatnya Rahasia.” Dengan demikian, tindakan tersebut dapat memberikan perlindungan kepada keanggotaan DPR dan Para Menteri dalam mengemban tugas-tugasnya, serta diharuskan menjaga kerahasiaan dalam proses pengambilan keputusan.

e. Periode Masa perjuangan Kemerdekaan

Setelah kemerdekaan, berbagai organisasi politik dan partai-partai dibubarkan. Namun, para pejuang sebelumnya tetap melanjutkan perjuangan mereka melalui lembaga-lembaga yang didirikan Oleh Jepang, seperti halnya Masyumi dan Putera. Dalam struktur lembaga ini, mereka senantiasa terus menuntut kemerdekaan meskipun dalam hal ini keberadaan *volksraad* tidak lagi terlihat ataupun diakui. Perbedaan pun

terlihat dengan pindahnya Belanda ke Jepang. Pada tahun 1943, pada masa itu, Jepang mendirikan sebuah organisasi bernama *Tjuo Sang-in*, ditugaskan sebagai perwakilan dari Jepang. Organisasi ini memiliki tugas yaitu guna mengawasi penyelidikan yang dilakukan oleh *Saiko Saikikin*, merupakan perwira tertinggi. Tugas tersebut berkaitan dengan kegiatan pengintaian di Asia Timur Raya. Dengan demikian, *Tjuo Sangi-in* sebetulnya bukan sebuah organisasi perwakilan yang autentik, melainkan dapat dianggap sebagai parlemen yang mewakili kepentingan Bangsa Indonesia. (Ii & Pustaka, 2014)

3. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat

Sebagai perwakilan dari pada suara rakyat, Dewan Perwakilan rakyat memiliki tanggung jawab penuh untuk membela kepentingan masyarakat luas, yang pada hakikatnya dapat menjadikan peluang untuk tercapai kemakmuran bagi seluruh rakyat. Tugas ini seharusnya tidak didasarkan untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau bahkan sebuah kelompok tertentu. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat merupakan wujud dari masyarakat itu sendiri, sehingga dalam hal ini harus menjadi pondasi kuat bagi setiap keputusan yang akan diambil. *Jimly Asshiddiqie*, dalam pandangannya “kekuasaan legislative adalah sebuah cerminan dari suara dan aspirasi rakyat. Lembaga tertinggi di Negara adalah Badan Legislatif, yang memiliki tujuan yang luhur: yakni dalam mewujudkan sebuah

kemasyarakatan yang harmonis, damai serta komunitas yang dapat hidup berdampingan dengan baik.

a. Fungsi DPR

Pada periode 2014-2019 kualitas DPR dalam menjalankan fungsi legislasi dinilai sangat rendah. Seharusnya sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk membentuk Undang-undang, fungsi legislasi ini merupakan peran utama DPR, yang memiliki dampak signifikan sebab melalui legislasi nya DPR dapat memengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan di Indonesia. Sangat disayangkan, pelaksanaan fungsi tersebut tidak berjalan dengan baik. DPR telah dianggap kurang produktif, semua itu sudah dibuktikan dari jumlah Rancangan Undang-undang yang diusulkan hanya sedikit. (Ratnia Solihah, 2016)

Dalam hal ini, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) juga memiliki fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, dan dalam memberikan pertimbangan. Namun, DPD diberikan kewenangan terbatas sebagai mana dijelaskan dalam Pasal 22D Ayat (1) dan (2) UUD 1945 menyatakan bahwa: (1) DPD hanya berwenang mengajukan Rancangan Undang-undang kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, pemerintah pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, penggabungan daerah serta mengelola sumber daya alam dan ekonomi, serta dengan adanya perimbangan

keuangan pusat dan daerah; (2) selain itu, DPD juga berperan dalam Rancangan Undang-undang yang berhubungan dengan pembayaran pajak, pendidikan, dan agama. (Akbarrudin, 2013)

b. Wewenang DPR

Kewenangan Lembaga Legislatif diatur dalam Pasal 71 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPRD, yang sebagaimana telah menjelaskan berbagai bentuk kewenangan yang dimiliki oleh DPR RI antara lain sebagai berikut:

- a.) Ditetapkan Undang-undang melalui diskusi bersama Presiden untuk tercapainya suatu kesepakatan;
- b.) Dipindahkan persetujuan atau menolak memberikan Peraturan pemerintah pengganti UU yang telah diajukan oleh presiden untuk di muat dalam Undang-undang;
- c.) Mendiskusikan hasil dari Rancangan Undang-undang yang telah sah diusulkan oleh Presiden dan DPR, segalanya berkaitan dengan adanya otonomi daerah, terbentuknya peluasan gabungan wilayah, dan pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi, serta dengan diperhitungkan keuangan bagi pusat dan daerah. Di dalam keputusan tersebut dapat melibatkan DPD sebelum diberikannya persetujuan antara DPR dan Presiden;
- d.) Melakukan pembahasan bersama Presiden mengenai pembuatan Undang-undang APBN yang sudah

- diajukan, dan harus tetap dipertimbangkan pendapat dari DPD;
- e.) Pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan diseleksi oleh DPD;
 - f.) Segala hal ketentuan yang telah di pertimbangkan akan menggunakan kewenangan dari pada Presiden.
- c. Tugas DPR RI
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014, dalam Pasal 72 diuraikan peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhubung dengan MPR, dan DPRD. Dalam penulisan ini, secara jelas telah disampaikan bahwasanya DPR RI mengemban tanggung jawab tertentu diantaranya:
- a.) Penyusunan Program Lembaga Nasional;
 - b.) Perumusan dan pembahasan mengenai Rancangan Undang-undang (RUU).
 - c.) Penerimaan RUU yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mencakup beberapa isu, seperti hal nya otonomi daerah, hubungan antara pusat dan juga daerah, pembentukan atas pemekaran, dan tergabung nya suatu daerah, serta pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi yang di imbangi keuangan antara pusat dan daerah;
 - d.) Mendiskusikan RUU yang telah diusulkan oleh Presiden maupun DPD;
 - e.) Ditetapkannya Undang-undang bersama dengan presiden;
 - f.) Memberikan persetujuan juga penolakan terhadap segala peraturan

perundang-undangan yang diajukan oleh Presiden untuk dijadikan Undang-undang.

SIMPULAN

Dalam hasil dari penelitian ini dengan jelas dan terinci menggambarkan pengalaman serta pengetahuan yang diperoleh dalam kunjungan ke Gedung Rapat Paripurna DPR RI, Museum DPR RI, dan berbagai destinasi wisata di Lembang, Bandung. Dalam analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kunjungan ke DPR RI dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai proses serta peran lembaga Negara dalam perjalanan sejarah demokrasi di Indonesia. Gedung Rapat Paripurna menggunakan arsitektur yang megah dan mempunyai simbolis, mencerminkan signifikansi forum sebagai tempat pengambilan keputusan yang strategis bagi Bangsa dan Negara. Di dalam gedung DPR terdapat Museum yang menawarkan pengalaman edukasi serta sejarah, memperluas pemahaman kepada masyarakat mengenai peranan DPR dalam latar belakang sejarah kenasionalan.

Destinasi wisata di Lembang, Bandung menyuguhkan berbagai wisata seperti The Great Asia Afrika, Lembang Floating Market, dan D'castello. Destinasi ini menunjukkan peran yang krusial dalam mendukung pariwisata dengan melestarikan budaya, dan keindahan alam, meskipun setiap tempat menawarkan pengalaman yang unik, namun semuanya saling berkontribusi secara baik dalam meningkatkan apresiasi terhadap nilai-nilai budaya, sejarah, dan kekayaan alam.

Penelitian ini telah menunjukkan bahwasanya pendekatan kualitatif, dengan melalui observasi dan dokumentasi, sangat mampu mengungkap makna dari setiap pengalaman dan mengaitkan dengan latar belakang yang lebih luas.

DPR di Era Digital. *Journal of Tourism and Creativity*, 6(2), 134.
<https://doi.org/10.19184/jtc.v6i2.30685>

DAFTAR PUSTAKA

- Akbarrudin, A. (2013). Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI dan DPD RI Pasca Amandemen UUD 1945. *Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal)*, 8(1), 52–66.
<https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/2352>
- Ichsan, I., & Ali, A. (2020). Metode Pengumpulan Data Penelitian Musik Berbasis Observasi Auditif. *Musikolastika: Jurnal Pertunjukan Dan Pendidikan Musik*, 2(2), 85–93.
<https://doi.org/10.24036/musikolastika.v2i2.48>
- Ii, B. A. B., & Pustaka, T. (2014). *a.111.14.0010-05-Bab-Ii-20180813110403-Kedudukan-Dpr-Ri-Dalam-Menjalankan-Fungsi-Legislati-Ditinjau--Dari-Undang-Undang-Nomor-17-Tahun-2014-Tentang-Mpr,-Dpr,-Dpd,-Dan--Dprd-*. 13–26.
- JASMINE, K. (2014). 濟無No Title No Title No Title. *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*, 2(2).
- Makalah_tentang_Dewan_Perwakilan_Rakyat*. (n.d.).
- Ratnia Solihah, S. W. (2016). Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR. *Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Pemilu 2014: Permasalahan Dan Upaya Mengatasinya*, 2(17), 291–307.
- Sukirno, Z. L., & Haroni, N. (2022). Strategic Planning Promosi Pariwisata Museum